



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Berkas Korupsi BBM Setwan Seluma Segera Dilimpahkan**

**BENGKULU, BE** - Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menyatakan berkas perkara kasus dugaan korupsi penyimpangan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk 12 mobil dinas dan perbaikan suku cadang kendaraan di Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017 lengkap (P21).

Kajati Bengkulu, Amandra Syah Arwan SH MH melalui Kasi Penkum, Marthin Luther SH MH mengatakan Jaksa Pidsus Kejati Bengkulu menyatakan semua petunjuk yang telah diberikan sudah dilengkapi oleh penyidik Subdit

Tipikor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu.

Meski sudah lengkap, tetapi pelimpahan tahap II diperkirakan akan dilakukan awal Januari 2020.

"Jaksa sudah menyatakan berkas perkara korupsi BBM Setwan Seluma lengkap, tetapi pelimpahan tahap II kemungkinan akan dilakukan awal Januari 2020," jelas Kasi Penkum, kemarin (26/12).

Dua orang tersangka yang ditetapkan adalah SA sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Seluma dan FL sebagai Kasubag Keuangan DPRD Seluma. Total kerugian

negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi tersebut Rp 900 juta dari anggaran Rp 436 juta untuk suku cadang dan belanja BBM sebesar Rp1,2 miliar.

Kerugian negara tersebut belum dikembalikan.

Sudah puluhan orang saksi dimintai keterangan sampai kasus tersebut naik ke penyidikan. Salah satunya Sekda Kabupaten Seluma Irihadi MSI.

Seperti diketahui, anggaran biaya perbaikan suku cadang Rp 436 juta dan belanja BBM sebesar Rp 1,2 miliar untuk 12 unit mobil dinas lingkungan

Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017.

Ada dugaan fiktif dalam penggunaan anggaran tersebut. Mark up belanja BBM pimpinan dan anggota DPRD Seluma dan alat kelengkapan DPRD Seluma, saat dilakukan pemeriksaan audit BPK tidak ada kerugian negara. Hanya saja masih ada kekurangan administrasi jenis struk pembelian BBM, kemudian administrasi dilengkapi oleh Sekretariat Dewan.

Namun diduga terjadi penyimpangan sehingga dilakukan penyidikan oleh Polda Bengkulu. (167)